

Judul : Ragam Pesan Dibalik Penegakan Hukum
Tanggal : Selasa, 26 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Ragam Pesan di Balik Penegakan Hukum



BAMBANG SOESATYO
Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar/
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Tindak pidana atau kejahatan skala besar masih marak akibat lemahnya pengawasan oleh negara dan belum efektifnya sistem penegakan. Hanya dengan kepedulian dan kearifan publik, tindak pidana bisa diminimalisir. Itulah salah satu pesan yang diungkapkan dari potret penegakan hukum sepanjang 2017.

Ada sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik, tetapi isu terkait tindak pidana masih didominasi kasus-kasus korupsi. Perhatian publik dari seluruh wilayah Nusantara banyak tertisa karena kasus-kasus korupsi itu melibatkan sejumlah orang yang sedang menggenggam jabatan publik, terutama beberapa kepala daerah hingga pimpinan DPR. Isu tentang korupsi memuncak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai menggelar proses hukum kasus e-KTP.

Masih terkait dengan isu korupsi, sejak pertengahan 2017, publik juga mempersoalkan isu tentang langkah DPR membenarkan Panitia Khusus (Pansus) KPK. Lewat penggalangan opini, isu tentang Pansus KPK sengaja dimposisikan sebagai manuver DPR memperlemah KPK. Sebaliknya DPR berupaya meyakinkan masyarakat bahwa Pansus KPK lebih bertujuan memperkuat dan membenahi tata kelola KPK. Tidak mungkin DPR sebagai lembaga tinggi negara berniat memperlemah KPK ketika rakyat yang diwakilinya tahu betul bahwa praktik korupsi masih sangat marak, baik pada birokrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Isu lain yang juga tidak kalah intensitasnya adalah tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Dilhat sebagai pasar yang besar, intensitas penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia tetap tinggi. Paling menghebohkan adalah kasus penangkapan kapal Waderlust yang mengangkut satu seberat 1 ton di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Negara harus lebih bersungguh-sungguh memerangi penyelundup dan

pengedar narkoba.

Masyarakat pun harus meningkatkan kepedulian atas masalah ini. Kecenderungannya sudah sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan para penjahat, tetapi juga melibatkan oknum pegawai atau petugas negara. Masa depan ketahanan nasional menjadi taruhannya karena para pengedar narkoba menasar generasi muda.

Tindak pidana penipuan dengan beragam modus yang membidik orang banyak pun masih marak. Demikian maraknya sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus membentuk Tugass (Satgas) Waspada Investasi. Dalam periode Januari-Oktober 2017, Satgas ini harus menghentikan kegiatan usaha 62 perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 12 perusahaan sedang menjalani proses hukum. Satgas harus menutup puluhan perusahaan itu karena tidak memiliki izin usaha atau produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Lagi pula ada potensi kerugian yang akan ditanggung masyarakat karena imbal hasil yang ditawarkan tidak masuk akal.

Tentu saja kasus First Travel paling menghebohkan. Perusahaan ini memang tidak menawarkan produk investasi, tetapi modusnya mirip dengan pelaku kejahatan yang menawarkan investasi bodong. First Travel menghimpun dana masyarakat yang akan melaksanakannya ibadah umrah di Tanah Suci. Jumlah dana yang dihimpun hampir mencapai satu triliun rupiah. Jumlah korbannya mencapai puluhan ribu orang. Proses hukum atas kasus ini pun sedang berjalan.

Maraknya praktik korupsi, penyelundupan narkoba, dan penipuan yang membidik orang banyak bisa terjadi karena sistem pengawasan oleh negara masih lemah. Ragam upaya pencegahan pun sudah dicoba, tetapi efektivitasnya terlihat sangat rendah. Semua institusi penegak hukum pun telah bekerja keras menindak para pelaku tindak pidana. Namun, sebagaimana bisa dilihat dan dirasakan, tindak pidana korupsi, kejahatan penyelundupan

dan peredaran narkoba serta ragam modus pidana penipuan masyarakat tetap marak.

Karena lemahnya pengawasan dan belum efektifnya penegakan, prioritas pilihan tindakan yang harus diambil adalah kesadaran bersama meminimalisasi tindak pidana dan sekaligus meminimalkan pula jumlah korban serta kerugian. Target ini bisa diwujudkan jika masyarakat meningkatkan kepedulian dan kearifan. Peduli pada ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Dan dengan mau belajar tentang akibat atau efek dari rangkaian peristiwa tindak pidana sebelumnya, masyarakat hendaknya lebih berfikir dalam membuat pilihan.

Pesan Politik

Tindak pidana korupsi yang melibatkan begitu banyak kepala daerah sejatinya memberi pesan politik kepada masyarakat. Pesan politiknya adalah masyarakat telah salah memilih. Karena salah, amarah kepemimpinan itu justru jatuh dalam genggamannya sosok kepala daerah yang korup. Kesalahan kolektif itu sangat melenceng terlihat sepanjang tahun ini. Sejak terhitung sejak Januari hingga September 2017, sebanyak delapan

(8) kepala daerah digelandang KPK karena terlibat korupsi. Semua pihak patut prihatin. Bayangkan, dalam rentang waktu kurang dari 60 hari (2 Agustus-26 September), tercatat 6 kepala daerah harus dinanpakan di ruang tahanan KPK. Mereka adalah Bupati Pame-

kasari Achmad Syafii (ditangkap pada 2 Agustus), Wali Kota Tegal Siti Masitah (29 Agustus), Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zukarnaen (13 September), Wali Kota Batu Edy Rumpoko (16 September), Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (22 September), dan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widayarsi (26 September). Sebelumnya ada Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditangkap pada 21 Juni 2017. Adapun Bupati Klaten, Jateng, Sri Hartini ditangkap 8 Januari 2016. Pada 2016, tercatat 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Presiden Joko Widodo akan membantu semua kepala daerah untuk memperbaiki peluang korupsi. Presiden akan mendorong semua kepala daerah menerapkan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran proyek. Untuk itu Presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) tentang penerapan e-planning, e-budgeting dan e-procurement. Untuk diketahui masyarakat, banyak kepala daerah kurang antusias merespons gagasan ini. Maka ketika memilih sosok kepala daerah, masyarakat hendaknya tidak ceroboh.

Waspada dan Hati-hati

Maraknya tindak pidana narkoba dan penipuan sepanjang 2017 memberi pesan kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati (*prudent*). Para orang tua harus meningkatkan kepedulian pada dinamika lingkungan masing-masing karena perdagangan dan peredaran narkoba makin marak. Gamparannya bisa terbaca dari perkiraan nilai transaksi narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, nilai transaksi

penjualan narkoba di dalam negeri diperkirakan sudah mencapai Rp250 triliun per tahun.

Kalau nilai transaksinya sebesar itu, dia juga menggambarkan luasnya jelaah peredaran narkoba di negara ini. Barang haram itu tidak hanya ditransaksikan di tempat-tempat hiburan, melainkan sudah berpenetrasi hingga ke permukiman penduduk. Tidak hanya dikonsumsi masyarakat di kota-kota besar, tetapi juga hingga ke pelosok-pelosok.

Begitu pula sudah terbukti bahwa narkoba tidak hanya diperjual-belikan bandar dan pengedar. Bahkan oknum penegak hukum hingga sipir penjara pun melakukan pekerjaan terlarang itu. Belum lama ini seorang kepala polisi di wilayah Jakarta Pusat ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Barat karena yang bersangkutan menekuni pekerjaan sebagai bandar narkoba. Kasus ini menambah panjang daftar oknum aparat negara yang menjadi bagian sindikat narkoba.

Dengan begitu masyarakat tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perlindungan dari negara. Bahkan alat-siat negara sekalipun tampak kedodoran dalam mencegah penyelundupan narkoba. Seperti diketahui, pemerintah sudah membentuk satuan kerja lintas sektoral untuk menangkapi penyelundupan narkoba. Namun efektivitasnya belum maksimal.

Buktinya, pada Juli lalu, Kapal Waderlust yang mengangkut satu seberat 1 ton dari China bisa masuk hingga ke perairan Tanjung Berakit. Kendati Kapal Waderlust tertangkap, hal itu tetap saja menjadi bukti bahwa intensitas penyelundupan narkoba ke dalam negeri masih sangat tinggi. Untuk menangkapi penyelundupan, penegak hukum Indonesia harus mengamankan garis pantai sepanjang 18.000 km dengan ratusan pelabuhan kecil yang tersebar luas di banyak daerah terpencil.

Selain waspada pada penetrasi peredaran narkoba, masyarakat juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menyikapi maraknya aksi dan modus penipuan. Setidaknya, masyarakat

rakat patut belajar dari pengalaman buruk puluhan ribu orang yang menjadi korban First Travel. Ini benar-benar kasus penipuan skala sangat besar. Berhasil menghimpun dana sebanyak Rp848,7 miliar. Tercatat sedikitnya 58.682 calon jamaah atau pemilik dana yang menjadi korban penipuan.

Belajar dari kasus First Travel dan kasus-kasus lain, masyarakat harus bersikap hati-hati dalam menanggapi penawaran investasi, terutama investasi dengan iming-iming keuntungan sangat besar. Kesediaan masyarakat untuk waspada dan bersikap hati-hati sangat diperlukan untuk menangkapi penawaran jasa dan produk investasi yang tidak masuk akal.

Sinergi antara masyarakat dan polisi kini sangat terbuka. Seperti diketahui akhir-akhir ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berinovasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa polisi pun harus menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dalam kegiatan-kegiatan melanggah hukum.

Salah satu penyusunan agenda sedang berjalan adalah agenda *community policing* dan *democratic community policing*. Pendekatan *community policing* berorientasi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan kepolisian. Pada agenda *community policing*, masyarakat didorong untuk peduli pada keamanan dan ketertiban permukimannya. Individu atau kelompok warga diharapkan bisa segera merespons potensi gangguan keamanan dan ketertiban dengan tindakan terukur, misalnya dengan inisiatif melapor kepada polisi terdekat.

Melalui *community policing*, polisi dan masyarakat akan bisa menangkapi kejahatan narkoba, penipuan berkedok investasi, dan memberantas pungutan liar serta korupsi. Selamat Tahun Baru 2018. ■



POROS MAHASISWA

Rubrik "Poros Mahasiswa" memuat pro-kontra pendapat dari tiap kampus negeri atau swasta se-Indonesia terhadap suatu tema yang diberikan Redaksi. Ketentuan panjang artikel yang dikirimkan antara 400 hingga 450 kata. Artikel dapat dikirim ke e-mail poros.mahasiswa.sindo@gmail.com dilengkapi dengan identitas lengkap, foto terbaru, scan kartu tanda mahasiswa (KTM), serta nomor rekening. Dalam mengirimkan artikel harap mencantumkan nama lengkap dan asal kampus di judul e-mail.

Tema Poros Mahasiswa 8-31 Desember 2017:
"PENCAKAIAN INDONESIA DI TAHUN 2017"

Redaksi KORAN SINDO menerima artikel dari pembaca untuk mengisi rubrik Opini. Panjang artikel 800-1.000 kata (5.000-6.500 karakter) dan bisa dikirimkan ke email opini.sindo@mcgroup.com. Harap mencantumkan *curriculum vitae*, foto terbaru, serta nomor rekening.

Jika setelah seminggu sejak tanggal penempatan artikel belum ada konfirmasi langsung dari Redaksi, artikel yang dikirim dianggap dikembalikan ke penulis.